

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fokus dan inti utama pembangunan dalam Islam adalah pembangunan manusia itu sendiri termasuk aspek sosial dan budayanya. Ini berarti Islam menganggap diri manusia sendirilah yang merupakan tempat sebenarnya aktivitas pembangunan itu. Pemikiran ini berangkat dari pandangan Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah yang diamanahkan oleh Allah untuk mengelola bumi sesuai dengan kehendak-Nya (syariat Islam) yang pada suatu saat nanti (di akhirat) akan diminta pertanggungjawaban atas pembangunan (amalan) yang telah dilakukannya. Pembangunan dalam pemikiran Islam bermuara pada kata 'imârah atau ta'mîr sebagai isyarat dalam Al-Quran¹:

﴿وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ﴾

Artinya: "...Dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya..."²

Kemudian dihubungkan dengan penciptaan manusia di bumi sebagai khalifah:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".³

Kalimat ista'mara yang berasal dari kata 'amara mengandung arti permintaan atau perintah dari Allah yang bersifat mutlak agar manusia

¹ Saifullah, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Bandung: Gunung Djati Press, 2012), 44.

² QS. *Hûd* [11]: 61, Al-Quran in Ms. Word version, 3.0.0

³ QS. Al-Baqarah [2]: 30, Al-Quran in Ms. Word version, 3.0.0

menciptakan kemakmuran di muka bumi melalui usaha pembangunan.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa usaha pembangunan di mana ekonomi salah satu dimensinya adalah misi utama penciptaan manusia di muka bumi. Sementara itu, Ahmad Ibn Ali Al-Jassas melihat QS. Hûd: 61 ini dengan dua makna, yaitu makna *al-wujûd* atau kewajiban umat manusia untuk mengelola bumi sebagai lahan pertanian dan pembangunan.⁵ Kedua, ayat tersebut mengandung perintah Tuhan kepada umat manusia untuk membangun jagad raya. Perintah Allah tersebut bersifat wajib dan mutlak. Mayoritas penulis berpendapat kata *al-'imârah* (memakmurkan) identik dengan kata *at-tanmiyyah al-iqtishâdiyyah* (pembangunan ekonomi).

Berdasarkan paradigma ekonomi konvensional terdapat dua tujuan pokok dari pembangunan ekonomi. Pertama, meningkatkan pendapatan riil per kapita. Kedua, menegakkan keadilan distribusi pendapatan. Namun jika dilihat fakta di lapangan justru masalah terbesar dalam perekonomian modern, khususnya di negara-negara berkembang adalah rendahnya pendapatan masyarakat yang selanjutnya diperparah oleh tingkat kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan miskin yang semakin lebar. Perekonomian hanya digerakkan oleh segelintir orang dan tentunya juga dinikmati oleh segelintir orang tersebut. Artinya adalah permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan ekonomi di antara sesama mereka.

Islam dalam mendefinisikan pembangunan ekonomi tidak menafikan aspek pendapatan individu sebagai salah satu indikatornya. Karena Islam sangat mendambakan suatu masyarakat yang sejahtera secara materi agar mereka dapat melaksanakan kewajiban agamanya secara sempurna. Namun disisi lain Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan secara merata dan adil. Bahkan Islam menciptakan instrumen secara spesifik untuk mencapai distribusi tersebut melalui mekanisme zakat, infaq dan sedekah (ZIS) serta penumbuhan sifat kepedulian dan saling tolongmenolong di antara sesama dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. Pembangunan ekonomi harus berorientasi pada peningkatan komitmen individu terhadap agamanya. Artinya harus ada korelasi antara pembangunan

⁴ Saifullah, *Ekonomi Pembangunan Islam*, 44.

⁵ Ahmad Ibn Ali Al Jassas dalam Asmuni Mth, "*Konsep Pembangunan Ekonomi Islam*", (Al Wawaridi, Edisi X, 2003), 131.

ekonomi dengan peningkatan pemenuhan kewajiban-kewajiban terhadap agama. Tujuan akhir dari pembangunan ekonomi bukan seperti slogan ekonomi konvensional yang berbunyi “*homo economicus*” tapi justru terjadinya “*homo Islamicus*”, yaitu individu yang berperilaku sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Salah satu dari tujuan pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah terciptanya keadilan distribusi; berarti tercapainya minimal dalam pembangunan adalah terpenuhinya hak dasar kebutuhan ekonomi individu masyarakat, sebagai jaminan pemeliharaan *maqâshid syari’ah*, yang terdiri dari lima masalah pokok, berupa keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia, sebagai hak setiap individu. Tidak terpenuhinya hak dasar kebutuhan ekonomi disebabkan buruknya distribusi, akan menimbulkan problem ekonomi, yang jauh dari pengertian kondisi sejahtera. Al-Syatibi menganggap bahwa tujuan syariah (*maqâshid syari’ah*) adalah kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan, dalam hal ini, diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.⁶ Kemaslahatan manusia dapat teralisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat dikembangkan, dijaga dan dilestarikan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sementara itu menurut Al-Ghazali, tujuan utama syariah adalah untuk melayani kepentingan manusia dan untuk menjaga mereka dari segala sesuatu yang mengancam eksistensinya. Ia selanjutnya mengklasifikasikan *maqâshid* (tujuan) ke dalam empat bagian utama, yaitu dengan mengatakan:⁷

“The very objective of the Shariah is to promote the well-being of the people, which lies in safeguarding their faith (din), their self (nafs), their intellect (‘aql), their posterity (nasl), and their wealth (mal). Whatever ensures the safeguard of these five serves public interest and is desirable, and whatever hurts them is against public interest and its removal is desirable”.

Oleh karenanya, dengan jelas Al-Ghazali mengungkapkan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk mendorong kemaslahatan (kesejahteraan)

⁶ Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 381.

⁷ Umar Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al Shariah*, (IDB, 2008), 7.

manusia yang mana terletak pada pemeliharaan agama, hidup, akal, keturunan dan kekayaan. Selanjutnya, segala sesuatu yang melindung lima unsur kepentingan publik tersebut maka dianjurkan dilakukan. dan sebaliknya, segala sesuatu yang mengancamnya adalah harus dihilangkan. Al-Ghazali kemudian membagi tingkatan kebutuhan manusia menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharûriyât*, *hajiyât* dan *tahsiniyât*. *Dharûriyât* adalah merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia (agama, hidup, akal, keturunan dan harta). Pengabaian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan mengancam eksistensi kehidupan manusia dan akan menciptakan kerusakan di muka bumi dan kerugian di akhirat. Dan pemeliharaan dan pelestarian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia. Sementara *hajiyât* adalah dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Dan *tahsiniyât* adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak bermaksud untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang dan penghias kehidupan manusia.

Mustafa Anas Zarqa⁸ menjelaskan bahwa tidak terwujudnya aspek *dharûriyât* dapat merusak kehidupan manusia di dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *hajiyât* tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, tetapi hanya membawa kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Adapun pengabaian terhadap aspek *tahsiniyât* mengabaikan upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Lebih jauh, ia meyakini bahwa segala aktivitas atau sesuatu yang bersifat *tahsiniyât* harus dikesampingkan jika bertentangan dengan maqâshid yang lebih tinggi (*dharûriyah* dan *hajiyât*). Kebutuhan ekonomi pada skala *dharûriyâh* adalah segala barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan skala tersebut yang harus selalu tercukupi,

⁸ Mustafa Anas Zarqa, *Islamic Economic: An Approach to Human Welfare, Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics* (Selangor Darul Ehsan: Pelanduk Publication, 1989), 35-36.

sebagai penentu bagi eksistensi kehidupan manusia, agar tetap mampu melaksanakan kewajiban dan tugas sebagai khalifah di bumi, sesuai dengan tujuan manusia menurut perspektif Islam.

Sumber daya manusia memiliki peran penting dari terciptanya sebuah pembangunan, yaitu pembangunan yang bertujuan menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat dan dapat menjalankan kehidupan yang produktif. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, sumber daya manusia harus dapat berkembang dan mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki. Dalam arti sederhana pembangunan dapat dimaknai sebagai usaha atau proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya, pembangunan memiliki berbagai kompleksitas masalah. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, baik aspek ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.⁹

Human Development Report (HDR) menafsirkan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Pilihan yang dimaksud dan yang paling penting diantaranya yaitu pilihan untuk berumur panjang dan sehat, pilihan untuk berilmu pengetahuan, dan pilihan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.¹⁰

Menurut BAPPENAS (Badan Perencana Pembangunan Nasional), indeks pembangunan manusia memiliki peran sebagai ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks pembangunan manusia dengan metode baru dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta besarnya pengeluaran masyarakat untuk berkonsumsi sejumlah kebutuhan pokok yaitu pengeluaran per kapita sebagai pendekatan yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pembangunan untuk hidup yang layak. Dimulainya perhitungan indeks

⁹ Maharany Yunita, *Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan*. (Makasar: Universitas Hasanudin, 2012), 20.

¹⁰ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia*. (www.bps.go.id , diakses pada Desember 2018)

pembangunan manusia dengan metode baru yaitu pada tahun 2010 dan berlaku hingga sekarang.

Indeks pembangunan manusia Republik Indonesia pada tahun 2017 menduduki peringkat 113 dari 188 negara di dunia. Indeks pembangunan manusia memiliki peningkatan sekitar 30.5% dalam 25 tahun terakhir. Namun, dinilai tidak diimbangi dengan meningkatnya sejumlah indikator, sehingga justru bertolak belakang. Seperti tingkat kemiskinan dan kelaparan di Indonesia yang mencapai 140 juta orang dengan biaya hidup kurang dari Rp. 20.000,00 per hari, ditambah dengan gizi buruk yang diderita sekitar 19,4 juta orang. Tingkat kesehatan dan kematian juga masih sangat memprihatinkan, sebanyak 2 juta anak usia di bawah satu tahun belum menerima imunisasi lengkap. Kemudian tingkat kesehatan dan kematian, tercatat sebanyak dua juta anak di bawah usia satu tahun belum menerima imunisasi lengkap sedangkan tingginya angka kematian ibu sebanyak 305 kematian per 100 ribu kelahiran hidup juga sangat memprihatinkan. Untuk akses ke layanan dasar, masih sangat kurang sehingga banyak anak tidak bersekolah.¹¹

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia periode 2013-2017

No.	PROVINSI	2017	2016	2015	2014	2013
1.	DKI Jakarta	80,06	79,6	78,99	78,39	78,08
2.	DI Yogyakarta	78,89	78,38	77,59	76,81	76,44
3.	Kalimantan Timur	75,12	74,59	74,17	73,82	73,21
4.	Kep, Riau	74,45	73,99	73,75	73,4	73,02
5.	Bali	74,3	73,65	73,27	72,48	72,09
6.	Riau	71,79	71,2	70,84	70,33	69,91
7.	Sulawesi Utara	71,66	71,05	70,39	69,96	69,49
8.	Banten	71,42	70,96	70,27	69,89	69,47
9.	Sumatera Barat	71,24	70,73	69,98	69,36	68,91
10.	Jawa Barat	70,69	70,05	69,5	68,8	68,25
	Indonesia	70,81	70,18	69,55	68,9	68,31

Sumber: Publikasi BPS, *ipm.bps.go.id*

Menurut publikasi Badan Pusat Statistik pada tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan bahwa tingkat indeks pembangunan manusia Daerah Istimewa

¹¹ Fauzi Y. *Rangking Indeks Pembangunan Manusia Turun ke 113*. (Jakarta: CNN Indonesia, 2017)

Yogyakarta berada pada posisi kedua dari 34 provinsi di Indonesia, dimana posisi pertama diduduki oleh DKI Jakarta. Pada penelitian ini akan membahas kondisi pembangunan manusia khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2012 hingga 2018.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri merupakan provinsi terkecil kedua setelah DKI Jakarta, dengan luas 3.185,80 km² dan kepadatan penduduk rata-rata yaitu 1.084 jiwa per km². Provinsi ini memiliki satu kota yaitu Yogyakarta dan empat kabupaten yaitu Kulonprogo, Bantul, Sleman, serta Gunungkidul. Masyarakat Yogyakarta sendiri dinilai kurang sejahtera dalam kehidupan sehari-hari, melihat dari kepadatan penduduk yang ada meskipun beberapa kabupaten memang memiliki wilayah yang luas dan dapat mengimbangi jumlah penduduk yang ada, namun kemudian banyak timbul permasalahan yang lain yaitu seperti kurangnya sarana dan pra sarana kesehatan, pendidikan, dan penunjang kesejahteraan yang lain. Hal yang demikian diakibatkan oleh pembangunan yang kurang merata, peran pemerintah yang belum sepenuhnya optimal sehingga terkesan mengesampingkan masyarakat dan justru memfasilitasi investor. Berikut adalah ulasan mengenai indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:

Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi D I Yogyakarta periode 2013-2017

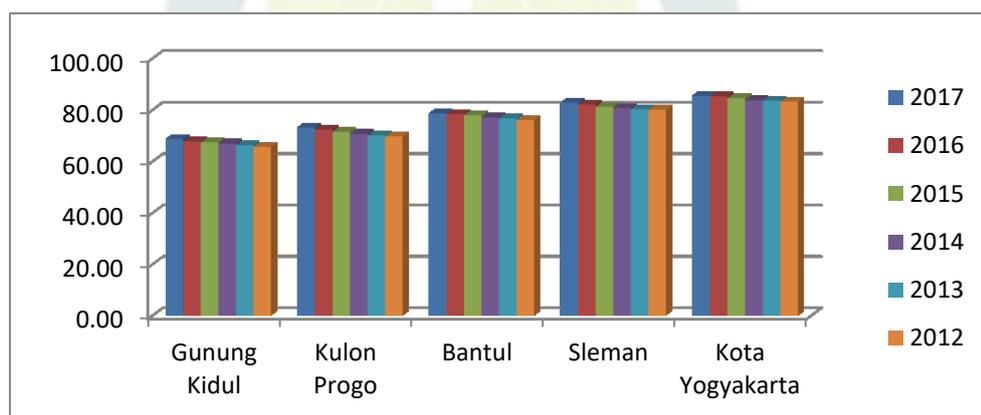
No.	KABUPATEN/KOTA	2017	2016	2015	2014	2013	2012
1.	Kota Yogyakarta	85,49	85,32	84,56	83,78	83,61	83,29
2.	Sleman	82,85	82,15	81,20	80,73	80,26	80,10
3.	Bantul	78,67	78,42	77,99	77,11	76,78	76,13
4.	Kulon Progo	73,23	72,38	71,52	70,68	70,14	69,74
5.	Gunung Kidul	68,73	67,82	67,41	67,03	66,31	65,69

Sumber: Publikasi BPS, ipm.bps.go.id

Dari data indeks pembangunan manusia diatas dapat terlihat bahwa pembangunan kualitas hidup masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat dari tahun ke tahun. Di Kabupaten Kulonprogo dari tahun 2012 hingga 2017 indeks pembangunan manusia terus mengalami peningkatan dengan rata-rata 0.59% pada tiap tahunnya. Kemudian di Kabupaten Bantul dari tahun 2012

hingga 2017 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatannya sebesar 0.52%.

Seperti halnya indeks pembangunan manusia pada dua kabupaten sebelum, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul juga mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2017 dengan rata-rata peningkatan sebesar 0.60%. Selanjutnya yaitu indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sleman, dari tahun 2012 hingga tahun 2017 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0.41%. Kemudian indeks pembangunan manusia di Kota Yogyakarta juga mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2017 dengan rata-rata peningkatan sebesar 0.43%. Dari data tersebut dapat dilihat dalam bentuk perbandingan grafik sebagai berikut:



Sumber: Publikasi BPS, ipm.bps.go.id

Gambar 1.1. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Antar Wilayah di D.I. Yogyakarta

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan

menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar. Berikut adalah data Produk Domestik Regional Bruto berbagai Provinsi di Indonesia:

**Tabel 1.3 Produk Domestik Regional Bruto
berbagai Provinsi di Indonesia periode 2013-2018**

Urutan	PROVINSI	2018	2017	2016	2015	2014	2013
1	Riau	156,67	149,61	148,59	145,38	151,66	139,27
2	Bali	152,08	147,33	141,37	136,62	128,42	117,79
3	Bengkulu	150,35	144,17	138,20	132,23	125,36	118,18
4	Nusa Tenggara Timur	150,27	144,69	140,32	134,08	126,60	119,07
5	DKI Jakarta	149,71	144,64	140,21	136,75	128,32	119,28
26	Kalimantan Timur	137,28	130,82	115,92	114,62	118,27	118,38
27	Nusa Tenggara Barat	137,14	130,88	123,21	118,28	111,24	105,52
28	Jawa Tengah	134,78	131,18	128,06	125,31	120,59	114,22
29	Kalimantan Selatan	134,21	130,63	126,22	123,63	119,76	113,75
30	Sulawesi Tenggara	133,70	129,42	124,76	120,17	115,13	110,54
31	D.I. Yogyakarta	132,49	129,07	125,40	121,52	116,73	112,29
32	Papua	131,89	126,96	121,79	115,34	109,83	104,90
33	Papua Barat	131,74	126,16	121,79	120,14	115,76	111,12
34	Aceh	122,94	120,26	117,59	114,58	112,69	108,57
	34 Provinsi	142,36	137,48	132,88	129,00	124,15	117,47

Sumber: Publikasi BPS, ipm.bps.go.id

Dari data Tabel 1.3 diatas dapat terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki urutan ke 31 dari 34 Provinsi, sedangkan nilai Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DI. Yogyakarta berada pada urutan kedua setelah DKI Jakarta. Lima Provinsi dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto tertinggi merupakan provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia yang Baik dan memasuki 10 urutan tertinggi dari 34 Provinsi di Indonesia, sedangkan D.I Yogyakarta memiliki nilai Produk Domestik Regional Bruto yang relatif rendah di urutan 31 dari 34 provinsi.

Setiap tahunnya penduduk Indonesia selalu meningkat, kebutuhan masyarakat atas barang dan jasa juga turut meningkat. Pada pertengahan tahun 1997 sampai tahun 1998, konsumsi masyarakat Indonesia sempat mengalami penurunan karena terjadi krisis nilai tukar rupiah yang terus mengalami (depresiasi), yang kemudian disusul dengan krisis moneter dan pada akhirnya berubah menjadi krisis ekonomi yang menimbulkan konsekuensi terhadap ketidak

setabilan perekonomian Indonesia. Dari kebijakan tersebut berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat karena pendapatan masyarakat tetap sementara harga-harga barang dan jasa naik. Selain itu juga tingkat suku bunga mengalami peningkatan cukup signifikan di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menimbulkan konsumsi masyarakat mengalami penurunan, karena masyarakat lebih memilih penyimpanan uangnya di bank dengan kompensasi bunga dari pada konsumsi.¹²

Pada dasarnya faktor yang paling berpengaruh terhadap konsumsi adalah pendapatan, namun tidak dapat dipengaruhi terhadap faktor-faktor yang lain cukup berpengaruh kuat terhadap konsumsi masyarakat. Salah satunya kebijakan fiskal oleh pemerintah mengemukakan bahwa, Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi.¹³ Berikut adalah data Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga berbagai Provinsi di Indonesia:

Tabel 1.4 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga berbagai Provinsi di Indonesia periode 2013-2018

Urutan	PROVINSI	2018	2017	2016	2015	2014	2013
1	Riau	161,09	157,93	153,81	149,25	140,35	130,76
2	Kep. Bangka Belitung	158,92	153,22	145,31	137,88	130,97	122,30
3	Maluku	157,62	154,46	151,42	144,74	137,49	124,47
4	Kalimantan Utara	156,97	152,93	149,31	144,03	133,79	124,94
5	DKI Jakarta	156,34	151,49	146,26	142,03	131,84	122,69
6	Sulawesi Selatan	156,26	149,76	144,13	138,06	129,75	121,63
7	Papua	155,15	146,99	141,15	133,79	129,48	121,55
8	Kalimantan Tengah	153,85	150,05	141,93	133,14	125,07	118,33
9	Sumatera Selatan	151,44	146,45	141,31	136,25	133,10	125,57
10	Sumatera Utara	150,75	146,03	140,63	135,49	130,46	122,66
11	D. I. Yogyakarta	150,74	146,91	141,45	136,93	131,20	125,03
12	Kalimantan Timur	150,66	144,94	140,46	135,26	126,78	120,27
13	Kalimantan Barat	150,58	146,78	140,80	134,81	129,55	121,55
14	Bengkulu	149,91	146,56	143,58	138,15	129,31	121,06
15	Sulawesi Tengah	148,32	141,12	137,61	133,79	126,09	116,93
	34 Provinsi	146,24	141,36	136,57	132,00	125,38	119,09

Sumber: Publikasi BPS, ipm.bps.go.id

¹² Brilliant Vanda Kusuma, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi masyarakat Indonesia", (Tahun 1988-2005). 35.

¹³ Ani Sri Rahayu, S.IP, M.AP, *Pengantar Kebijakan Fiskal*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2010), 37.

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas dapat terlihat bahwa Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki urutan ke 11 dari 34 Provinsi, sedangkan nilai Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DI. Yogyakarta berada pada urutan kedua setelah DKI Jakarta. Lima Provinsi dengan nilai Konsumsi Rumah Tangga tertinggi merupakan provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia yang Baik dan memasuki 10 urutan tertinggi dari 34 Provinsi di Indonesia, sedangkan D.I Yogyakarta memiliki nilai Konsumsi Rumah Tangga di urutan 11 dari 34 provinsi.

Mengacu kepada berbagai uraian tersebut maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang indeks pembangunan manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membuat penelitian yang berjudul ***Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011 – 2018.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011 - 2018?
2. Seberapa besar pengaruh Konsumsi Rumah Tangga terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011 - 2018?
3. Seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Konsumsi Rumah Tangga secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011 - 2018?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)* secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011 - 2018.

2. Untuk menganalisis pengaruh Konsumsi Rumah Tangga secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011 - 2018.
3. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Konsumsi Rumah Tangga secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011 - 2018.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis sebagai tambahan pengetahuan, bahan wacana maupun bahan referensi mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Kegunaan Praktis, sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi Provinsi D.I. Yogyakarta dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan – kebijakan yang diambil dalam mengelola Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Konsumsi Rumah Tangga agar memperoleh Indeks Pembangunan Manusia yang menjadi tolak ukur kesejahteraan.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

NO	JUDUL DAN NAMA PENELITI	VARIABEL	HASIL PENELITIAN
1.	Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016,	- $X_1 =$ Pertumbuhan Ekonomi - $X_2 =$ Kemiskinan - $X_3 =$ Pendidikan - $X_4 =$ Indeks Gini	Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: - Variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel pendidikan berpengaruh positif secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia - Variabel indeks gini

	(Maulida Astuti, 2018) ¹⁴	- Y = Indeks Pembangunan Manusia	berpengaruh negative secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia - Variabel kemiskinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
2.	Analysis of Factors Affecting the Human Development Index in North Sumatra Province (Asmita, Fitrawaty & Ruslan, 2017) ¹⁵	- X ₁ = Pertumbuhan Ekonomi - X ₂ = Kemiskinan - X ₃ = Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan - X ₄ = Pendapatan - X ₅ = Pengeluaran Pemerintah untuk kesehatan - Y = Indeks Pembangunan Manusia	Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa: - Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia - Variabel kemiskinan, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, dan pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia - Variabel pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
3.	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat Periode 2011- 2014 (Amalina, 2016) ¹⁶	- X ₁ = Jumlah Penduduk Miskin - X ₂ = Konsumsi Rumah Tangga - X ₃ = PDRB Perkapita - X ₄ = Jumlah distribusi Alat Kesehatan - Y = Indeks Pembangunan Manusia	Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa: - Variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia - Variabel Konsumsi Rumah Tangga dan PDRB perkapita berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia - Variabel jumlah distribusi alat kesehatan berpengaruh tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia

¹⁴ Maulida Astuti, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016", (Yogyakarta: Tesis UII, 2017).

¹⁵ Asmita, Fitrawaty, & Ruslan, D. "Analysis of Factors Affecting the Human Development Index in North Sumatra Province." (IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) 2019), 27-36.

¹⁶ Amalina, R. P. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat Periode 2011- 2014". (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2016)

4.	Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2001 - 2004 (Rafiq, 2016) ¹⁷	<ul style="list-style-type: none"> - X_1 = Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga - X_2 = Investasi - X_3 = Pengeluaran Pemerintah - Y = Indeks Pembangunan Manusia 	<p>Hasil dari penelitian tersebut yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variabel Konsumsi Rumah Tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. - PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia - Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia - Variabel konsumsi rumah tangga, PMA dan oengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia
5.	Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pembangunan Manusia Tahun 2008-2014 Studi Kasus Kab/Kota D.I Yogyakarta (Basuki &vSaptutyingsih, 2013) ¹⁸	<ul style="list-style-type: none"> - X_1 = Konsumsi Rumah Tangga - X_2 = Pengeluaan pemerintah untuk kesehatan - X_3 = Pengeluaran Pemerintah untuk fasilitas umum - X_4 = rasio gini - X_5 = Jumlah penduduk miskin - Y = Indeks Pembangunan Manusia 	<p>Hasil dari penelitian tersebut adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variabel Konsumsi Rumah Tangga tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia - Variabel pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, pengeluaran pemerintah untuk fasilitas umum, rasio gini dan jumlah penduduk miskin berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
6.	Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di	<ul style="list-style-type: none"> - X_1 = Angka partisipasi sekolah - X_2 = Jumlah sarana kesehatan - X_3 = Persentase 	<p>Hasil penelitian tersbut adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variabel angka partisipasi sekolah memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia

¹⁷ Muhammad Rafiq, "Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2001 – 2004". (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 2016).

¹⁸ Basuki, A. T., & Saptutyingsih, E, "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pembangunan Manusia Tahun 2008- 2014 -Studi Kasus Kab/Kota D I Yogyakarta. (Yogyakarta: Jurnal Ekonomi UMY, 2013).

	Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel (Meliana & Zain, 2013) ¹⁹	rumah tangga dengan akses air bersih - X_4 = Partisipasi angkatan kerja - X_5 = PDRB perkapita - Y = Indeks Pembangunan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel jumlah sarana kesehatan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia - Variabel persentase rumah tangga dengan akses air bersih memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia - Variabel tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia - Variabel PDRB perkapita memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia
7.	Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah (Mirza, 2011) ²⁰	<ul style="list-style-type: none"> - X_1 = Kemiskinan - X_2 = Pertumbuhan Ekonomi - X_3 = Belanja Modal - Y = Indeks Pembangunan Manusia 	<p>Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variabel kemiskinan berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia - Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia - Variabel belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen indeks pembangunan manusia.
8.	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode	<ul style="list-style-type: none"> - X_1 = PDRB - X_2 = APBD - X_3 = rasio ketergantungan - X_4 = Kemiskinan - Y = Indeks 	<p>Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variabel PDRB dan variabel APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

¹⁹ Meliana, A., & Zain, I, "Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel", (Jurnal Sains dan Seni POMITS, 2013), 2.

²⁰ Mirza, D. S. "Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap IPM di Jawa Tengah", (Semarang: JEJAK (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan) UNNES, 2011), 1 2

	2008-2012 (Bhakti, 2012) ²¹	Pembangunan Manusia	- Variabel rasio ketergantungan dan variabel kemiskinan berpengaruh negative dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
9.	Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Pratowo, 2010) ²²	- X_1 = Belanja daerah perkapita - X_2 = Proporsi pengeluaran non makanan per kapita - X_3 = Gini rasio - X_4 = Rasio ketergantungan - Y = Indeks Pembangunan Manusia	Hasil dari penelitian tersebut yaitu: - Variabel belanja daerah per kapita dan Proporsi pengeluaran non- makanan perkapita berpengaruh secara positif signifikan - Variabel gini rasio dan rasio ketergantungan berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia

Penelitian Maulida Astuti,²³ diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi dan variabel pendidikan berpengaruh positif secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, Indeks gini berpengaruh negative secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, Variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel pendidikan berpengaruh positif secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2010 - 2016.

Penelitian Meliana & Zain²⁴ diperoleh hasil bahwa Kemiskinan berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, Belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen indeks pembangunan manusia.

Penelitian Amalina²⁵ diperoleh hasil bahwa Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia,

²¹ Nadia Ayu Bhakti, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012". (Jurnal Ekonomi dan Keuangan, ISSN 1411-0393, 2012).

²² Nur Isa Pratowo, "Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia". (Jurnal Studi Ekonomi Indonesia, 2010)

²³ Maulida Astuti, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016".

²⁴ Meliana, A., & Zain, I. "Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel", 2.

²⁵ Amalina, R. P. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat Periode 2011- 2014".

Konsumsi Rumah Tangga dan PDRB perkapita berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Distribusi Alat Kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian Bhakti²⁶ diperoleh hasil penelitian bahwa PDRB dan APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, rasio ketergantungan dan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Penelitian Basuki dan Saptutyningisih²⁷ diperoleh hasil penelitian bahwa Konsumsi Rumah Tangga tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, Pengeluaran pemerintah untuk fasilitas umum, rasio gini dan jumlah penduduk miskin berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas dapat diketahui beberapa perbedaan dan persamaan antara penelitian yang sekarang dilakukan penulis, diantaranya terletak pada variabel independen yang diteliti juga tempat penelitian yang akan diteliti. Pada penelitian sekarang menggunakan variabel Independen yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Konsumsi Rumah Tangga, serta variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DI. Yogyakarta Tahun 2011 - 2018.

F. Kerangka Berpikir

1. Pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Todaro²⁸ pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya soal

²⁶ Nadia Ayu Bhakti, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012."

²⁷ Basuki, A. T., & Saptutyningisih, "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pembangunan Manusia Tahun 2008- 2014 -Studi Kasus Kab/Kota D I Yogyakarta",

²⁸ Tulus H. Tambunan, "Perekonomian Indonesia", (Jakarta : Penerbit Ghalia, 2001), 43

bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya.

Menurut Mudrajad Kuncoro²⁹ pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, Kabupaten, atau kota. Menurut Kuznet³⁰, pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin³¹. Maka apabila PDRB pada suatu daerah meningkat, akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia pada daerah tersebut.

2. Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pemahaman tentang konsumsi rumah tangga bukanlah secara teori makroekonomi, tetapi lebih pada pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap pembangunan manusia. Diasumsikan bahwa rumah tangga melakukan aktifitas konsumsi pada dua jenis barang/jasa, yakni: makanan (*food*) dan bukan makanan (*non food*). Eksistensi konsumsi rumah tangga yang mencapai 52,3 persen dari PDB³² diyakini berperan penting dalam pembangunan manusia. Biaya yang dikeluarkan untuk

²⁹ Mudrajad Kuncoro, “*Metode Penelitian Kuantitatif*”, (Yogyakarta : UPP AMP YKPM, 2001) 28.

³⁰ Tulus H. Tambunan, “Perekonomian Indonesia”, 43

³¹ Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, “*Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk miskin*”,

(http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/PROS_2008MAK3.pdf, 2008)

³² Badan Pusat Statistik, BPS. (2018, Desember 1). Indeks Pembangunan Manusia, diakses dari [bps.go.id: www.bps.go.id](http://bps.go.id)

kelompok makanan dihitung menggunakan *consumption approach*, artinya yang sudah benar-benar dikonsumsi. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk kelompok bukan makanan dihitung menggunakan *delivery approach*, artinya konsumsi/pengeluaran barang-barang yang sudah dibeli/diperoleh/ digunakan oleh rumah tangga.

Konsumsi masyarakat kurang mapan didominasi oleh konsumsi kebutuhan-kebutuhan pokok atau primer. Sedangkan masyarakat mapan lebih banyak mengkonsumsi pada kebutuhan sekunder dan tersier. Makanan dapat dikategorikan sebagai kebutuhan pokok. Masyarakat Indonesia bergerak menuju kemapanan karena proporsi konsumsi makanan dari tahun ke tahun semakin berkurang. Salah satu indikator untuk menilai kesejahteraan masyarakat adalah struktur pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dengan pangsa pengeluaran makanan yang tinggi tergolong rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan relatif rendah dibandingkan dengan rumah tangga dengan proporsi pengeluaran makanan yang rendah. Hal ini mendukung Hukum Engel (*Engel's law*) yang ditemukan Engel (1857). Engel mengamati enam jenis pengeluaran rumah tangga, yakni: makanan, pakaian, perumahan, kendaraan/transportasi, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan tabungan.

Hukum Engel mengatakan: pada saat pendapatan meningkat, proporsi pengeluaran untuk makanan turun meskipun nilai aktualnya meningkat, dengan asumsi selera tetap. Jika *Engel's law* diterapkan terhadap Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa jika tingkat konsumsi rumah tangga tinggi maka akan mempengaruhi pembangunan manusia dibanding dengan konsumsi rumah tangga yang rendah.

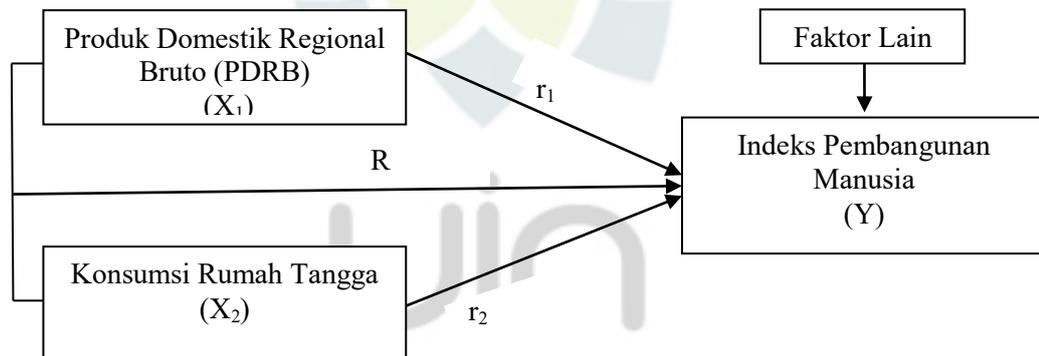
3. Pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Sadono Sukirno³³, laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau

³³ Sadono Sukirno, "*Makroekonomi Modern : perkembangan pemikiran dari klasik hingga keynesian baru*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 132

lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang. Menurunnya PDRB akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga sehingga kualitas pembangunan manusia akan ikut berpengaruh.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.2. Kerangka Berpikir

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap sebuah rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh dengan pengumpulan data.

1. Hipotesis pengaruh PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia

- a. H_0^1 : Tidak Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Indeks Pembangunan Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2011 – 2018
 - b. H_a^1 : Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Indeks Pembangunan Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2011 – 2018
2. Hipotesis pengaruh Konsumsi Rumah Tangga terhadap Indeks Pembangunan Manusia
- a. H_0^2 : Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Konsumsi Rumah Tangga dengan Indeks Pembangunan Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2011 – 2018
 - b. H_a^2 : Tidak Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Konsumsi Rumah Tangga dengan Indeks Pembangunan Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2011 - 2018
3. Hipotesis pengaruh PDRB dan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Indeks Pembangunan Manusia
- a. H_0^3 : Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Konsumsi Rumah Tangga dengan Indeks Pembangunan Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2011 – 2018
 - b. H_a^3 : Tidak Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Konsumsi Rumah Tangga dengan Indeks Pembangunan Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2011 - 2018